

**PENGUATAN KEPEMIMPINAN SISWA MELALUI PROGRAM BELA NEGARA  
GUNA MENUMBUHKAN NILAI CINTA TANAH AIR  
(STUDI KASUS SMPN 12 BANDUNG)**

Yusticia Lex Divina<sup>1</sup>, Dasim Budimansyah<sup>2</sup>, Pitria Sopianingsih<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu  
Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia  
[yusticiald.05@upi.edu](mailto:yusticiald.05@upi.edu)<sup>1</sup>, [budimasyah@upi.edu](mailto:budimasyah@upi.edu)<sup>2</sup>, [pitrias@upi.edu](mailto:pitrias@upi.edu)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the contribution of the National Defense Program in strengthening student leadership to foster a sense of patriotism at SMPN 12 Bandung. The study employs a qualitative approach using a case study design. Participants included the vic1e principal, Civic Education teachers, military advisors, and seventh-grade students selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and were analyzed using thematic analysis. The results indicate that the program contributes to fostering patriotism through structured character development. Student leadership is primarily shaped through collective emotional experiences. However, critical dynamics were identified, including pseudo-compliance and a gap between actions and awareness (the civic knowledge–action paradox), where student discipline remains dependent on external control. This study confirms that the internalization of civic values is not linear but is influenced by social relations, context, and individual reflection.*

**Keywords:** *National Defense, Love of the Homeland, Civic Knowledge–Action Paradox, Student Leadership, Pseudo-Compliance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi Program Bela Negara dalam memperkuat kepemimpinan siswa guna menumbuhkan nilai cinta tanah air di SMPN 12 Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Partisipan meliputi wakil kepala sekolah, guru PPKn, pembina TNI, dan siswa kelas VII yang dipilih secara *purposive*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berkontribusi membentuk nilai cinta tanah air melalui pembinaan karakter yang terstruktur. Kepemimpinan siswa terbentuk terutama melalui pengalaman emosional kolektif. Namun, ditemukan dinamika kritis berupa kepatuhan semu (*pseudo-compliance*) dan kesenjangan antara tindakan dengan kesadaran (*civic knowledge–action paradox*), di mana disiplin siswa masih bergantung pada kontrol

eksternal. Penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi nilai kewargaan tidak bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh relasi sosial, konteks, dan refleksi individu.

**Kata kunci:** Bela Negara, Cinta Tanah Air, *Civic Knowledge–Action Paradox*, Kepemimpinan Siswa, Kepatuhan Semu

### **A. Pendahuluan**

Melemahnya nasionalisme pada generasi muda menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam internalisasi nilai-nilai kewargaan. Temuan Manurung dkk. (2022) mengungkap adanya krisis identitas nasional pada remaja usia 15–20 tahun, tercermin dari kecenderungan memilih produk luar negeri, rendahnya pemahaman terhadap budaya lokal, serta lemahnya pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini semakin kompleks dengan kuatnya pengaruh budaya populer global yang menawarkan beragam identitas alternatif bagi generasi muda (Widiyanto dkk., 2024; Hamidah dkk., 2025).

Dalam konteks globalisasi, remaja cenderung mengembangkan identitas bikultural yang memperluas perspektif, namun berpotensi melemahkan keterikatan nasional. Selain membuka wawasan, globalisasi juga dapat memicu resistensi yang dianggap mengancam nilai dan keyakinan. Oleh karena itu,

permasalahan utama tidak terletak pada apa yang diajarkan, melainkan pada bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami, dimaknai, dan diinternalisasi dalam pengalaman hidup siswa (Arnett, 2003; Hermans & Dimaggio, 2007).

Perspektif Sosiologi Kewarganegaraan Nusantara memandang kewarganegaraan sebagai praktik sosial, moral, dan kultural yang nyata dalam kehidupan warga. Krisis nasionalisme pada generasi muda mencerminkan melemahnya praksis kewargaan, yaitu tidak terinternalisasinya nilai kebangsaan dalam tindakan dan kesadaran kolektif. Kewarganegaraan tidak hanya soal status hukum, tetapi juga partisipasi aktif dalam kehidupan politik (Isin & Turner, 2002).

Westheimer dan Kahne (2004) menekankan bahwa pembentukan warga negara melibatkan dimensi personal, partisipatif, dan keadilan sosial, sehingga tidak cukup hanya melalui transfer pengetahuan. Nilai cinta tanah air sebagaimana

diamanatkan UU No. 20/2003 meliputi menjaga kedaulatan, menghargai keberagaman, dan berkontribusi bagi bangsa. Aktualisasi nilai ini penting untuk memperkuat ketahanan nasional (Suriata, 2019), sehingga perlu dikembangkan melalui pembinaan yang integratif dan berbasis pengalaman, bukan sekadar pembelajaran di kelas.

Salah satu wahana yang potensial adalah Program Bela Negara, yang dapat dipahami sebagai pendekatan berbasis pengalaman untuk menjembatani kesenjangan antara nilai normatif dan praktik nyata. Kolb (2015) menjelaskan bahwa pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman yang melibatkan siklus pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif. Dalam kerangka teori kewarganegaraan, pendekatan ini mencerminkan integrasi perspektif liberal, republikan, dan komunitarian yang menempatkan individu sebagai subjek moral dalam komunitas sosial (Budimansyah, 2026b).

Dalam konteks program tersebut, kepemimpinan siswa menjadi elemen sentral bukan sebagai jabatan formal, melainkan

sebagai kapasitas mengambil inisiatif dan memengaruhi lingkungan secara positif. Guthrie dan Bertrand Jones (2012) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi merupakan elemen kritis bagi pengembangan kepemimpinan. Chong, Yuen, dan Leung (2018) menunjukkan bahwa pelatihan kepemimpinan melalui dewan siswa menjadi wahana efektif bagi kewarganegaraan aktif.

Ketika siswa memimpin dalam pelatihan kedisiplinan atau mengkoordinasi kegiatan wawasan kebangsaan, mereka menginternalisasi nilai cinta tanah air melalui pengalaman langsung (Brunell, 2013). Dengan demikian, kepemimpinan siswa bukan sekadar dampak program, melainkan medium internalisasi yang menghubungkan dimensi kognitif, afektif, dan praksis dalam penguatan nilai cinta tanah air.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan kontribusi pendidikan karakter terhadap penguatan nasionalisme siswa, namun masih menyisakan celah yang perlu dijembatani. Wibowo (2022) menemukan bahwa pendidikan karakter di sekolah meningkatkan kesadaran kebangsaan, namun

pelaksanaannya masih bersifat normatif. Rahmawati dan Lestari (2022) serta Hidayat (2023) menunjukkan bahwa kegiatan bela negara berkontribusi terhadap pembentukan karakter disiplin dan partisipasi kebangsaan. Handayani, Dewi, dan Furnamasari (2021) juga mengonfirmasi bahwa kesadaran bela negara dapat dibangun melalui sistem pertahanan yang terintegrasi dalam pendidikan.

Namun, studi-studi tersebut masih memiliki sejumlah keterbatasan: *pertama*, nasionalisme ditempatkan sebagai output yang diukur secara kuantitatif, bukan sebagai proses internalisasi yang dianalisis secara mendalam; *kedua*, hubungan antara program bela negara dan penguatan kepemimpinan siswa belum dikaji sebagai mekanisme yang saling terkait dalam menumbuhkan nilai cinta tanah air; dan *ketiga*, variasi pengalaman siswa termasuk kontradiksi antara kepatuhan formal dan kesadaran reflektif belum dieksplorasi secara memadai (Putri, 2022). Chong (2019) menunjukkan bahwa kualitas refleksi dan partisipasi siswa sangat menentukan kedalaman internalisasi nilai, yang semakin menegaskan

perlu analisis proses, bukan sekadar pengukuran hasil.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari analisis hasil menuju analisis proses, dengan menempatkan kepemimpinan siswa sebagai medium internalisasi nilai cinta tanah air dalam Program Bela Negara. Penelitian ini tidak sekadar mengukur apakah program berhasil meningkatkan nasionalisme, melainkan mengkaji bagaimana mekanisme penguatan kepemimpinan siswa melalui Program Bela Negara berlangsung dan berkontribusi dalam menumbuhkan nilai cinta tanah air melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, dan pembentukan kapasitas kepemimpinan. SMPN 12 Bandung dipilih sebagai konteks penelitian karena telah mengimplementasikan Program Bela Negara secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan institusi militer, mencakup pelatihan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, dan pembinaan kepemimpinan. Juhari (2015) menunjukkan bahwa pendidikan bela negara melalui kerja sama dengan Rindam III Siliwangi efektif bagi penguatan budaya kewarganegaraan generasi muda.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: **Bagaimana Program Bela Negara berkontribusi dalam pembentukan nilai cinta tanah air di kalangan siswa SMPN 12 Bandung?**

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Yin, 2018) untuk mengkaji secara mendalam implementasi Program Bela Negara dalam memperkuat kepemimpinan siswa dan menumbuhkan nilai cinta tanah air di SMPN 12 Bandung. Partisipan dipilih secara *purposive* (Patton, 2015), meliputi Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, guru PPKn, pembina dari unsur TNI, serta siswa kelas VII yang mengikuti program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi (Creswell & Creswell, 2018). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, *member checking*, serta *audit trail* (Lincoln & Guba, 1985).

Analisis data menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) yang dilakukan secara

bertahap: *open coding* untuk mengidentifikasi kode awal dari data mentah, *axial coding* untuk mengelompokkan kode ke dalam kategori, dan *selective coding* untuk menyusun tema utama yang menjelaskan hubungan antarkategori (Strauss & Corbin, 1998). Interpretasi temuan dikaitkan dengan kerangka teori kepemimpinan dan nilai nasionalisme serta mempertimbangkan konteks sosial-budaya sekolah, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif sekaligus interpretatif.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kontribusi Program Bela Negara dalam pembentukan nilai cinta tanah air di kalangan siswa**

Program Bela Negara di SMPN 12 Bandung menunjukkan kontribusi dalam membentuk nilai cinta tanah air melalui proses pembinaan karakter yang terstruktur dan kontekstual. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga mengintegrasikan penanaman nilai kebangsaan melalui kegiatan pelatihan, wawasan kebangsaan, serta pembinaan kepemimpinan siswa. Sekolah sebagai lingkungan

pendidikan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan program tersebut sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya proses internalisasi nilai pada diri siswa. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soekarno yang menekankan bahwa bela negara tidak semata-mata diwujudkan dalam bentuk pertahanan fisik, melainkan juga melalui pembentukan kesadaran nasional, semangat persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, Soekarno menegaskan bahwa kekuatan bangsa terletak pada karakter dan jiwa nasionalisme warganya. Dalam perkembangannya, konsep tersebut dipertegas dalam kajian Pendidikan Bela Negara yang menyatakan bahwa penanaman nilai cinta tanah air dilakukan melalui proses pendidikan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga nilai tersebut tidak hanya dipahami secara kognitif tetapi juga terwujud dalam sikap dan perilaku siswa.



**Gambar 1. Kegiatan Bela Negara  
SMPN 12 Bandung**  
**Sumber: (Arsip Dokumentasi  
SMPN 12 Bandung)**

Kontribusi Program Bela Negara dalam membentuk nilai cinta tanah air pada siswa juga dapat dianalisis melalui perspektif nasionalisme yang dikemukakan oleh Hans Kohn.

Kohn (1944) memandang nasionalisme sebagai suatu paham yang menekankan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan negara, yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga tercermin dalam kesadaran kolektif, identitas, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks ini, nilai cinta tanah air pada siswa tidak hanya dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol negara, tetapi juga sebagai keterlibatan nyata dalam menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta menunjukkan

tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa.

Melalui Program Bela Negara, proses pembentukan nasionalisme tersebut terlihat dalam berbagai aktivitas yang mendorong keterlibatan langsung siswa dalam kegiatan kebangsaan. Kegiatan seperti pelatihan kedisiplinan, upacara bendera, serta pembinaan wawasan kebangsaan menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negaranya.

Hal ini selaras dengan pandangan Kohn yang menyatakan bahwa nasionalisme tumbuh melalui pengalaman sosial dan interaksi dalam komunitas yang membentuk kesadaran bersama (Kohn, 1944). Dengan demikian, keterlibatan siswa dalam program bela negara tidak hanya membangun pemahaman, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai cinta tanah air melalui praktik nyata di lingkungan sekolah.

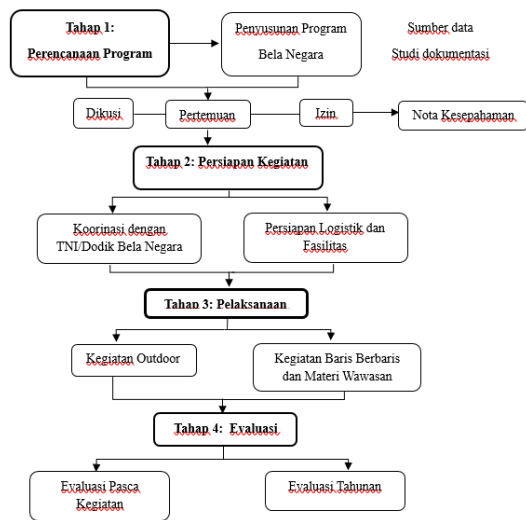
Lebih lanjut, Tujuan pelaksanaan Program Bela Negara di SMPN 12 Bandung, yang salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Pendidikan Dasar Siswa (PDS) yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan Bela Negara di dodik rindam

III siliwangi, diarahkan pada pembentukan karakter dan kepribadian siswa yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada penguatan aspek fisik dan kedisiplinan, tetapi juga menekankan pada pengembangan sikap tangguh, mandiri, serta berjiwa kepemimpinan sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik.

Selain itu, program ini bertujuan untuk membiasakan siswa memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Dalam konteks ini, tujuan program bela negara dapat dipahami sebagai upaya sistematis dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air melalui pembinaan sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter warga negara yang baik. berikut disajikan bagan yang menggambarkan tahapan kegiatan program tersebut :



**Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Program Bela Negara di SMPN 12 Bandung**  
**Sumber: (Diolah Oleh Peneliti, 2026)**

Secara umum, proses perancangan pelaksanaan kegiatan Program Bela Negara di SMPN 12 Bandung diawali dengan proses perencanaan. Hasil perencanaan dilanjutkan pada tahap pra-pelaksanaan sebagai bentuk pematangan persiapan, dan diaktualisasikan dalam tahap pelaksanaan kegiatan, selanjutnya melakukan evaluasi untuk menilai ketercapaian serta perubahan sikap siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di area sekolah. Adapun berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, jadwal kegiatan dalam Program Bela Negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kegiatan harian, yaitu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari selama program berlangsung. Kegiatan ini meliputi bangun pagi, ibadah, senam pagi, apel pagi dan malam, serta pengaturan waktu makan dan istirahat. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, keteraturan, dan tanggung jawab siswa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
2. Kegiatan inti (terstruktur), yaitu kegiatan utama yang menjadi fokus pembinaan kepemimpinan siswa, seperti outbound, permainan kerja sama tim, pelatihan baris-berbaris, serta pemberian materi bela negara. Dalam kegiatan ini, siswa dilatih untuk bekerja sama, memimpin kelompok, serta mengambil keputusan dalam situasi tertentu.
3. Kegiatan pembinaan karakter, yaitu kegiatan yang bersifat reflektif dan penguatan nilai, seperti caraka malam, api unggun, serta kegiatan kebersamaan lainnya yang bertujuan menanamkan nilai tanggung jawab, empati, dan cinta tanah air.
4. Kegiatan kondisional, yaitu kegiatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, seperti penyesuaian jadwal akibat faktor cuaca atau kebutuhan tertentu



pembentukan identitas kolektif dalam lingkungan sekolah. Hal ini memperkuat bahwa nilai cinta tanah air tidak muncul secara instan, melainkan terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan dan didukung oleh program pendidikan yang terarah.

Keterkaitan antara Program Bela Negara, nilai cinta tanah air, dan pembentukan kepemimpinan siswa tidak dapat dipahami sebagai hubungan linear yang selalu menghasilkan dampak positif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses tersebut bersifat dinamis, kontekstual, dan mengandung ketegangan antara nilai yang diajarkan dengan cara siswa memaknainya. Dalam kerangka kepemimpinan autentik dari Bill George (2003), pembentukan kepemimpinan siswa dapat dianalisis melalui dimensi *purpose*, *values*, *heart*, *relationships*, dan *self-discipline*. Namun, alih-alih berkembang secara ideal, kelima dimensi ini memperlihatkan dinamika yang tidak seragam, termasuk munculnya paradoks antara kepatuhan dan kesadaran, yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini.

1) *Purpose*: antara orientasi nilai dan simbolisme kebangsaan

Program Bela Negara berupaya membentuk tujuan kepemimpinan siswa yang berlandaskan cinta tanah air. Secara empiris, siswa menunjukkan peningkatan disiplin, tanggung jawab, dan kebanggaan terhadap identitas nasional. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa *purpose* yang terbentuk pada sebagian siswa masih bersifat simbolik. Siswa mampu menjalankan praktik kebangsaan seperti upacara dan kegiatan seremonial, tetapi belum tentu memiliki refleksi mendalam mengenai makna tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi kepemimpinan yang terbentuk masih berada pada level eksternal. Dengan kata lain, siswa melakukan nasionalisme, tetapi belum sepenuhnya menghidupinya sebagai tujuan hidup.

2) *Values*: antara internalisasi nilai dan kepatuhan semu

Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan capaian yang paling menonjol dari program. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai tersebut

sering kali muncul dalam bentuk kepatuhan normatif, bukan kesadaran moral. Disiplin yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh struktur kegiatan yang ketat dan pengawasan dari pembina. Ketika kontrol eksternal melemah, sebagian siswa menunjukkan penurunan konsistensi perilaku. Kondisi ini mengindikasikan adanya kepatuhan semu (*pseudo-compliance*), di mana siswa mematuhi aturan karena tekanan situasional, bukan karena kesadaran internal. Temuan ini secara langsung mengarah pada *civic knowledge-action paradox*, yaitu situasi ketika siswa mengetahui nilai kebangsaan, bahkan mampu mempraktikkannya dalam konteks tertentu, tetapi belum menginternalisasikannya sebagai bagian dari identitas diri. Dengan demikian, keberhasilan program pada level perilaku belum tentu mencerminkan keberhasilan pada level kesadaran.

3) *Heart*: pengalaman emosional kolektif sebagai mekanisme utama

Salah satu temuan paling kuat dalam penelitian ini adalah bahwa pembentukan kepemimpinan siswa justru terjadi melalui pengalaman emosional kolektif, bukan semata melalui instruksi formal. Kegiatan

seperti kerja sama tim, api unggun, dan interaksi intensif antar siswa menciptakan pengalaman kebersamaan yang memperkuat empati, solidaritas, dan rasa memiliki.

Dalam kerangka George (2003), dimensi *heart* berkembang relatif kuat karena siswa mengalami langsung nilai dalam konteks sosial. Namun demikian, efek pengalaman ini tidak selalu berkelanjutan dan cenderung bergantung pada intensitas kegiatan. Selain itu, terdapat variasi respons siswa: sebagian mengalami keterlibatan emosional yang mendalam, sementara yang lain hanya berpartisipasi secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kolektif merupakan mekanisme penting, tetapi tidak otomatis menghasilkan internalisasi nilai yang merata.

4) *Relationships*: antara kolaborasi edukatif dan dominasi otoritas

Kolaborasi antara sekolah dan TNI memberikan kontribusi dalam memperkaya pengalaman belajar siswa, khususnya dalam aspek kedisiplinan dan pembentukan karakter. Namun, pola relasi yang terbentuk cenderung bersifat hierarkis dan berorientasi pada otoritas.

Interaksi yang menekankan perintah dan kepatuhan berpotensi membatasi ruang dialog dan refleksi kritis siswa.

Dalam konteks ini, hubungan yang terbentuk belum sepenuhnya mencerminkan relasi kepemimpinan autentik yang berbasis kepercayaan dan keterbukaan, tetapi lebih menyerupai relasi instruksional. Implikasinya, kepemimpinan siswa yang berkembang cenderung mengikuti pola kepemimpinan yang patuh terhadap otoritas, bukan kepemimpinan yang reflektif dan mandiri.

5) *Self-discipline*: paradoks antara kesadaran dan kepatuhan

Dimensi *self-discipline* menjadi titik paling krusial sekaligus paling problematis dalam penelitian ini. Secara empiris, siswa menunjukkan peningkatan kedisiplinan yang signifikan. Namun, analisis lebih dalam menimbulkan pertanyaan mendasar. Temuan menunjukkan bahwa disiplin siswa masih sangat bergantung pada struktur, aturan, dan pengawasan eksternal. Ketika konteks berubah, sebagian siswa tidak mempertahankan perilaku tersebut secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin yang terbentuk belum sepenuhnya menjadi

*self-discipline*, melainkan masih berada pada tahap *externally enforced discipline*.

Ini memperkuat konsep civic knowledge–action paradox, di mana terdapat kesenjangan antara apa yang diketahui, dilakukan, dan dihayati oleh siswa. Dengan demikian, keberhasilan program perlu dibaca secara lebih kritis, tidak hanya dari perubahan perilaku yang tampak, tetapi dari kedalaman internalisasi nilai yang terjadi. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasi Program Bela Negara:

- a. Dominasi pendekatan struktural dan disiplin Program lebih menekankan kepatuhan terhadap aturan dibandingkan pengembangan kesadaran reflektif.
- b. Keterbatasan ruang refleksi siswa Kegiatan belum secara sistematis mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka secara kritis.
- c. Variasi internalisasi nilai Tidak semua siswa mengalami proses yang sama; terdapat perbedaan dalam tingkat pemaknaan dan keterlibatan.

d. Efek yang cenderung situasional  
Beberapa perubahan perilaku  
belum menunjukkan  
keberlanjutan di luar konteks  
program.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada bagaimana pengalaman tersebut diproses dan dimaknai oleh siswa. Secara keseluruhan, Program Bela Negara memiliki potensi kuat sebagai ruang praksis kewargaan dalam membentuk kepemimpinan siswa. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa proses tersebut tidak sederhana dan mengandung berbagai dinamika, termasuk kepatuhan semu, variasi pengalaman, serta paradoks antara kesadaran dan tindakan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa:

1. Kepemimpinan siswa tidak terbentuk terutama melalui instruksi, tetapi melalui pengalaman emosional kolektif
2. Internalisasi nilai kewargaan tidak selalu linear, melainkan dipengaruhi oleh relasi sosial, konteks, dan refleksi individu
3. Disiplin sebagai indikator utama justru membuka ruang analisis kritis

tentang perbedaan antara kepatuhan dan kesadaran

Meskipun Program Bela Negara menunjukkan berbagai dampak positif dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan siswa, penting untuk melihat bahwa efektivitas program tidak bersifat absolut. Analisis kritis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah dinamika yang tidak sepenuhnya mencerminkan keberhasilan ideal sebagaimana sering digambarkan dalam narasi normatif. Pertama, munculnya resistensi siswa menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Tidak semua siswa terlibat secara aktif dan antusias dalam kegiatan. Sebagian siswa menunjukkan keterlibatan yang bersifat minimal, mengikuti kegiatan hanya karena kewajiban, bukan karena dorongan internal. Resistensi ini tidak selalu tampak secara eksplisit, tetapi dapat terlihat melalui sikap pasif, kurangnya partisipasi dalam diskusi, atau keterlibatan yang bersifat formalitas.

Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak selalu berjalan secara mulus, melainkan dipengaruhi oleh kesiapan dan motivasi individu

siswa. Kedua, terdapat indikasi **efek seremonial** dalam beberapa aktivitas program. Kegiatan seperti upacara, penghormatan bendera, dan simbol-simbol kebangsaan memang penting sebagai media pembelajaran, namun dalam praktiknya berpotensi menjadi rutinitas yang dijalankan tanpa pemaknaan mendalam.

Dalam kondisi ini, siswa cenderung menjalankan aktivitas sebagai kewajiban prosedural, bukan sebagai ekspresi kesadaran kebangsaan. Akibatnya, nilai yang ditanamkan berisiko berhenti pada tataran simbolik dan tidak berkembang menjadi kesadaran reflektif. Ketiga, temuan penelitian juga menguatkan adanya fenomena “**kepatuhan semu**” (***pseudo-compliance***), terutama dalam aspek kedisiplinan. Siswa menunjukkan perilaku disiplin selama kegiatan berlangsung, tetapi perilaku tersebut tidak selalu konsisten di luar konteks program.

Hal ini menunjukkan bahwa disiplin yang terbentuk masih dipengaruhi oleh kontrol eksternal, seperti pengawasan dan aturan yang ketat, bukan sepenuhnya berasal dari kesadaran internal. Kondisi ini memperkuat adanya kesenjangan

antara tindakan dan kesadaran, yang dalam kajian kewarganegaraan dikenal sebagai *civic knowledge–action paradox*.

Keempat, pendekatan program yang cenderung **berbasis struktur dan otoritas** juga menjadi catatan kritis. Keterlibatan pihak eksternal dengan pola pelatihan yang menekankan instruksi dan kepatuhan berpotensi membatasi ruang refleksi kritis siswa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membentuk pola kepemimpinan yang lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap otoritas daripada kemampuan berpikir mandiri dan reflektif. Padahal, dalam perspektif kepemimpinan autentik, kesadaran diri dan kemampuan refleksi merupakan elemen penting dalam pembentukan karakter pemimpin.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa Program Bela Negara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai program yang “selalu berhasil”, melainkan sebagai proses pendidikan yang mengandung berbagai dinamika, termasuk resistensi, simbolisme, dan paradoks internalisasi nilai. Kritik ini bukan untuk menegasikan peran program, tetapi justru untuk

memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan pendidikan kewarganegaraan sangat bergantung pada kemampuan program dalam mendorong refleksi, kesadaran, dan keberlanjutan nilai dalam kehidupan siswa.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, Program Bela Negara di SMPN 12 Bandung berkontribusi dalam membentuk nilai cinta tanah air melalui pembinaan karakter yang terstruktur, mencakup pelatihan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, dan pembinaan kepemimpinan siswa. Kepemimpinan siswa terbentuk terutama melalui pengalaman emosional kolektif seperti kerja sama tim, api unggun, dan interaksi intensif antarsiswa, bukan semata melalui instruksi formal. Dalam kerangka kepemimpinan autentik, dimensi *purpose, values, heart, relationships*, dan *self-discipline* berkembang secara tidak seragam, menunjukkan bahwa internalisasi nilai bersifat dinamis dan kontekstual.

Namun, penelitian ini juga mengungkap sejumlah dinamika kritis. Ditemukan fenomena kepatuhan semu (*pseudo-compliance*), di mana

disiplin siswa masih bergantung pada kontrol eksternal dan belum sepenuhnya menjadi kesadaran internal. Terdapat pula kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan (*civic knowledge–action paradox*), serta pendekatan berbasis otoritas yang berpotensi membatasi ruang refleksi kritis siswa. Oleh karena itu, pengembangan program ke depan perlu memperkuat dimensi reflektif, memberikan ruang dialog yang lebih terbuka, serta memastikan keberlanjutan nilai di luar konteks program agar internalisasi cinta tanah air tidak berhenti pada tataran simbolik.

#### **Daftar Pustaka**

- Arnett Jensen, L. (2003). Coming of age in a multicultural world: Globalization and adolescent cultural identity formation. *Applied Developmental Science*, 7(3), 189-196.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Brunell, L. A. (2013). Building global citizenship: Engaging global

- issues, practicing civic skills. *Journal of Political Science Education*, 9(1), 16–33.
- Budimansyah, D. (2026a). *Sosiologi Kewarganegaraan Nusantara*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Budimansyah, D. (2026b). *Integrasi Perspektif Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Chong, E. K. M., Yuen, W. W. T., & Leung, Y. W. (2018). Student council and student leadership training in Hong Kong primary schools. *Citizenship Teaching & Learning*, 13(3), 329–349.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A., & Anwar, K. (2021). Kepemimpinan siswa dalam pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 123–135.
- Guthrie, K. L., & Bertrand Jones, T. (2012). Teaching and learning: Using experiential learning and reflection for leadership education. *New Directions for Student Services*, 140, 53–63.
- Hamidah, L., Mufid, A. W., Ahmad, A. K., Ichwanto, R., Fitri, S. G., & Putri, N. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme pada Generasi yang Terpengaruh Globalisasi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1574-1582.
- Hans Kohn. (1944). *The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background*. New York: Macmillan.
- Hermans, H. J., & Dimaggio, G. (2007). Self, identity, and globalization in times of uncertainty: A dialogical analysis. *Review of general psychology*, 11(1), 31-61.
- Hidayati. (2021). *Karakteristik Kepemimpinan Siswa dalam Lingkungan Pendidikan*.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2002). *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage Publications.
- Juhari, S. Y. (2015). Strategi pengembangan budaya kewarganegaraan (civic culture) melalui pendidikan

- bela negara bagi nasionalisme dan patriotisme generasi muda (Disertasi doktoral, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- Manurung, E. S. D., Salsabila, F. I., Wirawan, P. T. P., Anggraini, N. D., & Pandin, M. G. R. (2022). Identity crisis as a threat among Indonesian young generations. *Populasi*, 30(1).
- Manurung, E. S. D., Salsabila, F. I., Wirawan, P. T. P., Anggraini, N. D., & Pandin, M. G. R. (2022). *Identity crisis as a threat among Indonesian young generations*. *Populasi*, 30(1), 1–9.
- Muhtar, Z., Yulianti, Y., & Hanafiah, H. (2021). Pendidikan bela negara di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 3(2), 198-218.
- Nugraha, M. T. (2021). Membentuk karakter kepemimpinan pada peserta didik melalui pendekatan pembelajaran deep learning. *Al-hikmah (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)*, 3(1), 15-23.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE.
- Putri, N. A. (2022). Pendidikan kewarganegaraan dan penguatan nasionalisme siswa. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 5(2), 89–98.
- Rahmawati, D., & Lestari, S. (2022). Peran media digital dalam menumbuhkan nasionalisme generasi muda. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 6(1), 55–66.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research* (2nd ed.). SAGE.
- Suriata, I. N. (2019). Aktualisasi kesadaran bela negara bagi generasi muda dalam meningkatkan ketahanan nasional. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 47-56.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American*

*educational research*  
*journal, 41(2), 237-269.*

Wibowo, T. (2022). Implementasi nilai nasionalisme dalam pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan, 28(3), 201–210.*

Widiyanto, D., Prananda, A. R., Novitasari, S. P., & Syahroni, M. (2024). Kearifan lokal dan Pancasila: Strategi penguatan nilai kebangsaan dalam pendidikan. *Surabaya: PT. Cakrawala Candradimuka Literasi.*

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). SAGE.